

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata merupakan kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Sementara itu, (Damanik, 2006) mendefinisikan pariwisata yaitu fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

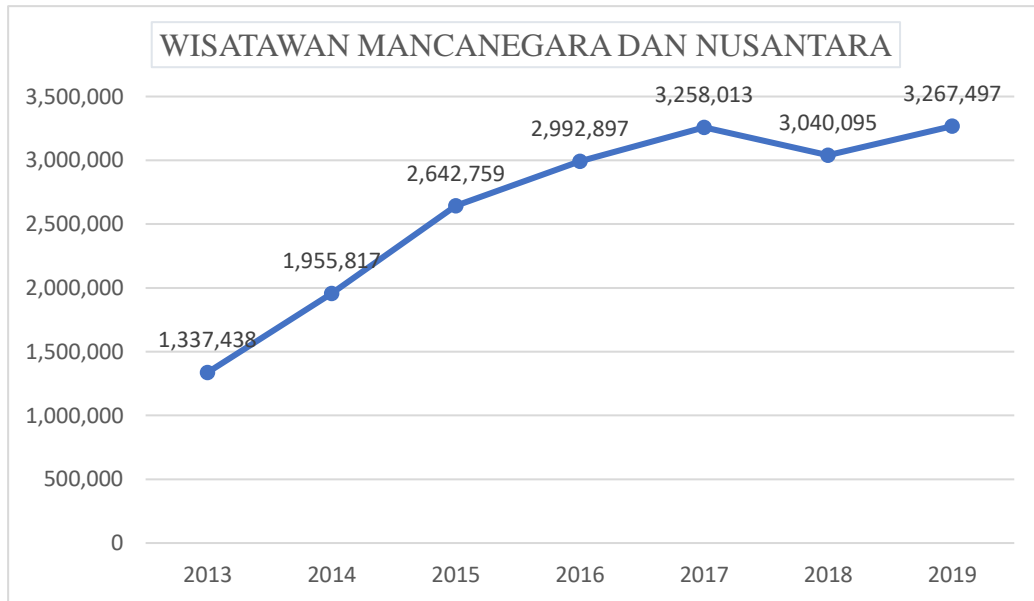
Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan pengertian pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata sebagai kegiatan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah

yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

Pariwisata di Indonesia sangat diminati oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun wisatawan dari mancanegara. Seperti halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka daerah harus memiliki strategi untuk menggali lebih banyak objek wisata baik lokasinya maupun ragamnya. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini merupakan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah melalui sektor pariwisata.

Salah satu daerah di Yogyakarta yang mengalami perkembangan pengelolaan pariwisata adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul salah satu kabupaten yang mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dengan beberapa kebijakan yang telah diambil. Salah satu kebijakan Pemkab Gunungkidul di bidang kepariwisataan ialah pengembangan berbagai destinasi wisata seperti wisata alam, goa dan destinasi wisata berbasis komunitas seperti Desa Wisata Bejiharjo. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tercatat relatif naik dari tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan namun tahun 2019 naik kembali, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

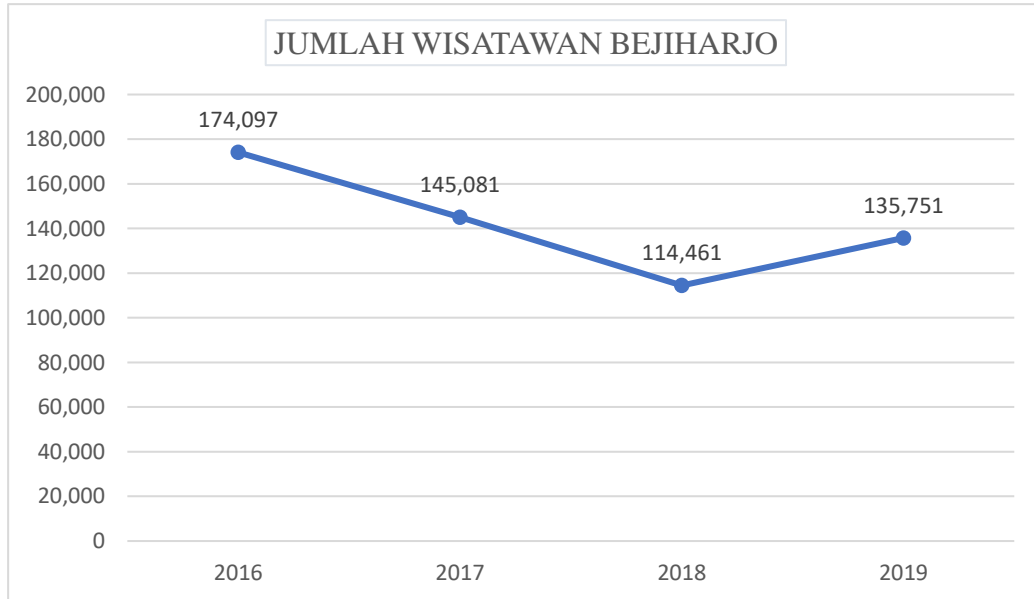
Bagan 1.3: Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Periode 2013-2019



Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2019

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Asti Wijayanti Penurunan terjadi akibat adanya isu tsunami maupun beberapa bencana alam seperti gelombang tinggi, banjir dan tanah longsor seperti tahun 2019 (Aditya, 2019). Sehingga jika pantai dinyatakan bahaya untuk dikunjungi otomatis berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan. Penurunan tersebut tidak berlaku di Desa Wisata Bejiharjo. Pada tahun 2019 jumlah wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Bejiharjo mengalami peningkatan sekitar 21 ribu wisatawan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Bagan 1.4: Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Desa Wisata Bejiharjo Periode 2016-2019



Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2019

Desa Bejiharjo salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul telah resmi menjadi desa wisata pada tahun 2010. Tidaklah mudah sebuah Desa yang menyimpan banyak mitos melakukan transformasi untuk menjadi sebuah desa wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pada awal pengelolaan Pemerintah Desa Bejiharjo hanya dibantu oleh masyarakat sekitar yang kemudia dibentuk kelompok khusus untuk menangani Desa Bejihajo tersebut. Kelompok Sadar Wisata Dewanejo, adalah suatu kelompok yang beranggotaan sebagian masyarakat Desa Bejiharjo yang mempunyai keinginan memajukan potensi desa yang ada.

Desa Wisata Bejiharjo dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Bejiharjo (DEWA BEJO) ini mendapat predikat Desa Wisata Terbaik Se-DIY yang

diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY. Pada tahun 2016, Badan Usaha Milik Desa yang bernama Maju Mandiri masuk sebagai wakil desa yang berfungsi untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1)).

Pengelolaan potensi alam yang dimiliki Desa Bejiharjo memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga setempat. Seperti diketahui bahwa sebelum adanya pembukaan Desa Wisata Bejiharjo masyarakat hanya mengandalkan mata pencaharian dari bertani, namun saat ini banyak warga yang terlibat dalam kegiatan pariwisata dengan mendirikan warung dan berjualan makanan khas, kerajinan tangan, dan jasa ojek di sekitar lokasi wisata. Penduduk sekitar yang terdiri atas bapak-bapak dan pemuda juga ikut diberdayakan dengan menjadi pemandu wisata. Masyarakat sekitar tergabung dalam Kelompok.

Dibutuhkan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antar pihak baik masyarakat maupun swasta dalam mengembangkan desa yang dapat membawa berkah bagi masyarakatnya, seperti halnya dalam Fungsi pengelolaan menurut George R. Terry dalam (Hasibuan, 2011) terdiri atas:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)

3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Berdasarkan uraian fungsi pengelolaan diatas, merupakan salah satu yang menjadi fokus dari penelitian ini. Konsep dasar fungsi pengelolaan tersebut juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Desa Wisata Bejiharjo.

Pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo tidak hanya dilakukan oleh pemerintah setempat melalui BUMDes, tetapi juga ada keterlibatan sektor Swasta yaitu BRI dan PT Lion Express. Salah satu dukungan swasta dalam kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Bejiharjo yaitu terjalannya Nota Kesepahaman BRI dan PT Lion Express tentang pemanfaatan layanan dan jasa Lion Parcel untuk BUMDes binaan BRI (Desa Bejiharjo, 2018). Dalam hal ini, BRI memberikan bantuan Teras Nusantara Cluster Wisata Goa Pindul Rp 280.000.000 dari Dirut BRI Suprajarto kepada Kepala Desa Bejiharjo, Yanto dan bantuan untuk BUMDes Percontohan Bejiharjo Rp 159.000.000 (Widiyanto, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo telah terjadi kolaborasi antara beberapa pihak yaitu pemerintah Kelurahan Desa Bejiharjo, BUMDes Maju Mandri, Pokdarwis Dewabejo, dan swasta yaitu BRI dan PT. Lion Express. Pada tahun 2019, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan ke Desa Wisata Bejiharjo dalam rangka menunjuk Desa Wisata Bejiharjo sebagai desa percontohan Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya merupakan penggabungan dari beberapa

peringkat Desa yaitu Desa Wisata, Desa Preneur, Desa Prima dan Desa Budaya. Maka dari itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan desa wisata Bejiharjo dengan mengambil judul penelitian “Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan desa wisata berbasis desa mandiri budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan desa wisata berbasis desa mandiri budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain :

## 1. Kegunaan Teoritis

Adalah sebagai kontribusi positif bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata berbasis desa mandiri budaya.

## 2. Kagunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini berguna sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Gunungkidul dan dapat menjadi nilai tambah serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
- b. Bagi masyarakat Desa Bejiharjo, adalah memberikan penjelasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pengelola desa wisata telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun penelitian spesifik tentang topik yang berkaitan dengan



kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan wisata khususnya di Desa Bejiharjo belum ada yang pernah meneliti. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut jurnal yang ditulis oleh Lutfi Andrianto Leman (2018) yang berjudul Kolaborasi antar *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik, memaparkan mengenai masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan tersebut antara lain adalah Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik, UPT Sunan Giri, Yayasan makam sunan giri (YAMSARI), Pemerintah Desa Giri, pihak swasta dan Masyarakat sekitar kawasan pariwisata sunan Giri. Bentuk kolaborasi yang ada menunjukkan arah pada *Institutional Designed*, dimana peran para *stakeholders* satu dengan yang lain tidak saling mengintervensi serta keberhasilan dari proses kolaborasi terdapat tujuan dan target rencana kerja yang tepat. Bentuk kolaborasi *Institutional Designed* antara lain adalah Diskusi Langsung, membangun kepercayaan, komitmen pada proses kolaborasi, dan pemahaman bersama (Leman, 2018).
2. Menurut Tesis yang ditulis oleh Kohen Sofi (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 memaparkan mengenai dengan adanya *Collaborative Governance* maka pengelolaan BUMDES di desa tersebut sudah cukup baik, diantaranya

adalah adanya partisipasi masyarakat secara aktif yang mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDES Tirta Mandiri, serta *Collaborative Governance* dapat mendorong Pemerintah Desa Ponggok dan BUMDES Tirta mandiri menghasilkan program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat seperti kartu cerdas, kartu sehat dan kartu wirausaha (Sofi, 2018).

3. Menurut jurnal yang ditulis oleh Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul memaparkan mengenai *Collaboratif Governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan resmi yang mengikat kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan kurangnya kepercayaan antar *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata. Faktor penghambat berasal dari faktor budaya terkait kesadaran masyarakat yang menganggap wisata adalah hal yang negatif, faktor institusi terkait ketergantungan desa wisata terhadap Dinas Pariwisata maupun swasta sehingga terkesan mendominasi, serta faktor politik, sehingga tidak adanya regenerasi pengelola dan pokdarwis desa wisata mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia (Risanti, 2018).
4. Menurut Jurnal yang ditulis oleh Mira Janu Yustisi (2018) yang berjudul *Analisis Stakeholders* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan Di

Kabupaten Lombok Utara, memaparkan mengenai Hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, pertama dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan konflik diantara para stakeholder. Kedua, kerjasama tidak dilakukan antar ketiga sektor (pemerintah, swasta dan masyarakat), Ketiga, dilihat dari aspek koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan hanya ditentukan oleh para ahli saja (pemerintah). Keempat, kolaborasi yang dilakukan hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta (Yustisi, 2018).

5. Menurut Jurnal yang ditulis Anak Agung Istri Andriyani dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali) memaparkan Proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Penglipuran melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder pariwisata diharapkan meningkatkan peranannya terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan selalu menjaga kebersihan, kerapihan, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan serta dalam hal promosi oleh pengelola desa wisata baik melalui internet maupun brosur agar dicantumkan

lebih detail tentang kegiatan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran (Andriyani, Martono, & Muhammad, 2017).

6. Menurut Jurnal yang ditulis oleh Rizky Purna Aji Galih Pangestu dkk (2016) yang berjudul Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul), memaparkan mengenai Upaya pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Bejiharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pengembangan Desa Wisata Bejiharjo pemerintah desa masih mengalami beberapa hambatan-hambatan antara lain Belum dibuat susunan anggaran yang berdampak bagi pemerintah desa kebingungan dalam mengeluarkan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana wisata, Banyaknya pengelola obyek wisata yang belum resmi ikut dalam pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo yang mengakibatkan pendapatan pengelola resmi Desa Wsiata Bejiharjo tidak bisa maksimal dan lain sebagainya (Pangestu, 2016).
7. Menurut Muchamad Zaenuri dan Tunjung Sulaksono yang berjudul Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman) memaparkan Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Volcano Tour Merapi sebagai salah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Sleman sangat baik seperti penyediaan pelayanan wisata dan juga dalam usaha wisata. Model

pengelolaan pariwisata-bencana berbasis *collaborative governance* dari segi *shared vision* lebih banyak menekankan pada hubungan yang bersifat komando antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat. Disamping itu, dari segi partisipasi diwarnai hubungan yang bersifat koordinasi, baik kepada swasta maupun masyarakat (Zaenuri & Sulaksono, Pengelolaan Pariwisata Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman, 2015)

8. Menurut Paper yang ditulis oleh Muchamad Zaenuri yang berjudul Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif *Collaborative Governance* Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman memaparkan bahwa pengelolaan pariwisata-bencana dalam perspektif *collaborative governance* dengan memberikan otoritas penuh pada Tim Pengelola untuk menjadi penggerak transformasi merupakan alternatif utama agar pengelolaan pariwisata-bencana dapat berlanjut. *Collaborative governance* dalam konteks pariwisata-bencana mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi, dan dari *shared vision* menuju kemitraan (Zaenuri, Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman, 2016).
9. Penelitian Kirk Emerson dan Tina Nabatchi (2015) berjudul “*Collaborative Governance Regimes*”. Buku ini membahas tentang studi kasus *collaborative*

*governance* di beberapa Negara. Buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian bagian pertama, membahas tentang tinjauan umum mengenai *collaborative governance*; bagian kedua, kerangka *integrative collaborative governance*; bagian ketiga, studi kasus rezim *collaborative governance*; dan bagian keempat rezim *collaborative governance*. Pada bagian kerangka *integrative collaboration governance* dijelaskan Dinamika *Collaborative Governance* yang berfokus pada 3 komponen yaitu, Pergerakan prinsip bersama, Motivasi bersama dan Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. (Emerson & Nabatchi, 2015).

10. Penelitian Nikita Amalia dkk dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Hampir seluruh masyarakat Desa Tulungrejo telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan telah siap dalam industri pariwisata. Partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo lebih dari satu bentuk partisipasi. Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai buah apel. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi yaitu sosialisasi lebih lanjut dari POKDARWIS Desa

Tulungrejo untuk mengajak masyarakat yang belum aktif, salah satunya dengan mengadakan acara adat desa yang melibatkan seluruh masyarakat kemudian acara tersebut dipromosikan lebih luas sehingga menjadi suatu atraksi wisata dan menarik minat wisatawan (VGA, Kusumawati, & Hakim, 2018).

11. Menurut buku yang berjudul *Desa Mandiri, Desa Membangun* oleh Borni Kurniawan mengemukakan 3 langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” Langkah pertama, mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kedua, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Ketiga, memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa mandiri di lain pihak juga ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik. (Kurniawan, 2015).
12. Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon dengan judul “Analisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour”. Salah satu tindakan penerapan tata kelola kolaboratif terlihat melalui pengelolaan Tur Lava di Merapi. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi situs pariwisata, menggenangi pemerintah.

Karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan swasta, dan juga dengan warga negara. Makalah ini menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan warga negara. Berdasarkan analisis, bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah Kemitraan yang sesuai dengan klasifikasi Bryson (2014) (Diani & Simbolon, 2017).

13. Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi dengan judul “Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan *Collaborative* Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo dan Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi *Collaborative* Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui wawancara narasumber, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa, Model *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, secara umum adalah sama dengan Model *Collaborative Governance* yang dibuat oleh Ansel dan Gash. Ada beberapa faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, yaitu: Hubungan Kekerabatan, Arisan, Jam Karet, Musyawarah Mufakat, Nggih ra Kepanggih, Ngaruhke, Gotong Royong dan Swadaya, Mokogi, Ngomyongi, dan Mosobodoa, Paternalistik dan Orangnya Sekitar Itu itu Saja (Sambodo & Pribadi, 2016).



14. Natalia Kristianti dengan judul “Pemasaran Desa Wisata Bejiharjo Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo”. Hasil penelitian yaitu bahwa strategi STP yang dilakukan manajemen Dewa Bejo, yaitu: (1) segmentasi pasar dilakukan secara demografis, psikografis, dan geografis; (2) aktivitas targetting yang dilakukan lebih banyak menysasar pada kalangan pelajar di sekolah-sekolah serta instansi-instansi dan (3) positioning dilakukan melalui penyingkatan nama Dewa Bejo dari Desa Wisata Bejiharjo sebagai konsep untuk sekaligus memasarkan kepada masyarakat bahwa produk yang ditawarkan bukan hanya Goa Pindul. Sedangkan terkait dengan strategi bauran pemasaran 7P, yaitu: (1) produk unggulan Dewa Bejo adalah wisata alam yang berada di kawasan desa Bejiharjo; (2) promosi banyak dilakukan menggunakan website dan media sosial; (3) Dewa Bejo memiliki lokaso strategis; (4) Dewa Bejo menggunakan strategi diskon, kombinasi harga, dan kenaikan harga tiket untuk pengoptimalan pendapatan; (5) kapasitas personel ditingkatkan melalui berbagai macam pelatihan umum dan khusus; (6) Dewa Bejo melakukan perbaikan fasilitas umum untuk kenyamanan wisatawan; dan (7) proses manajemen dilakukan dengan berfokus pada pengorganisasian melalui peran aktif pemimpin dan adanya riset pemasaran, penciptaan budaya organisasi melalui kerja sama secara kekeluargaan dan komunikasi antar bagian, dan pengendalian kinerja pemasaran melalui rapat rutin dan pengamatan (Kristianti, 2019).

15. Menurut jurnal yang ditulis oleh Mia Fairuza dengan judul Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata(Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)”, bahwa (1) kolaborasi antara pemangku kepentingan di Pulau Merah hampir tidak berjalan dengan lancar. Namun demikian ada beberapa komponen kolaborasi yang dominan, yang berkontribusi pada keberhasilan pengembangan pariwisata di Pulau Merah. Komponen-komponen ini adalah saling pengertian, administrasi yang unggul, dan mutualitas yang menghasilkan kolaborasi ini dalam hal mencapai tujuan mereka walaupun beberapa konflik internal terjadi; (2) Pencapaian pembangunan inklusif di Pulau Merah sangat unggul karena manfaat pembangunan telah dirasakan secara merata dan didistribusikan kepada masyarakat lokal di sekitar Pulau Merah; sementara itu partisipasi masyarakat lokal cukup kuat, dan terakhir, pemahaman masyarakat lokal terkait dengan urgensi pelestarian lingkungan relatif tinggi (Fairuza, 2017).

Tabel 1.1. Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Kolaborasi antar <i>Stakeholde</i>	Penelitian kualitatif, dengan	Masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan tersebut antara lain adalah Dinas	Persamaan penelitian yaitu	Perbedaan penelitian yaitu

rs dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik (Lutfi Andrianto Leman, 2018)	pendekatan kasus	Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik, UPT Sunan Giri, Yayasan makam sunan giri, Pemerintah Desa Giri, pihak swasta dan Masyarakat sekitar kawasan pariwisata sunan Giri. Bentuk kolaborasi yang ada menunjukkan arah pada <i>Institutional Designed</i> , dimana peran para stakeholder satu dengan yang lain tidak saling mengintervensi serta keberhasilan dari proses kolaborasi terdapat tujuan dan target rencana kerja yang tepat.(Leman, 2018).	sama-sama menggunakan teori kolaborasi dan metode penelitian yang digunakan	dalam Pengembangan Pariwisata Religi
Collaborative Governance dalam Perencanaan	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	Dengan adanya Collaborative Governance maka pengelolaan BUMDES di desa tersebut sudah cukup baik, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat	Persamaan penelitian yaitu sama-sama	Perbedaan penelitian yaitu dalam Perencanaan

<p>n Pengelolaa n Badan Usaha Milik Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Kohen Sofi, 2016)</p>		<p>secara aktif yang mampu mendorong akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan BUMDES Tirta Mandiri, serta Collaborative Governance dapat mendorong Pemerintah Desa Ponggok dan BUMDES Tirta mandiri menghasilkan program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat seperti kartu cerdas, kartu sehat dan kartu wirausaha.</p>	<p>mengguna kan teori Collaborat ive Governan ce dan metode penelitian yang digunakan</p>	<p>an Pengelola an Badan Usaha Milik Desa Ponggok.</p>
<p>Collaborati ve Governanc e Dalam</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p><i>Collaboratif Governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari belum optimal. Hal ini dikarenakan belum</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-</p>	<p>erbedaan penelitian yaitu obyek</p>

<p>Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni, 2018)</p>		<p>adanya aturan resmi yang mengikat kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan kurangnya kepercayaan antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Faktor penghambat berasal dari faktor budaya terkait kesadaran masyarakat yang menganggap wisata adalah hal yang negatif, faktor institusi terkait ketergantungan desa wisata terhadap Dinas Pariwisata maupun swasta sehingga terkesan mendominasi, serta faktor politik, sehingga tidak adanya regenerasi pengelola dan pokdarwis desa wisata</p>	<p>sama menggunakan teori Collaborative Governance dan metode penelitian yang digunakan ,</p>	<p>yang dikaji. Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.</p>
--	--	---	---	--

		mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia.		
Analisis Stakeholders Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan Di Kabupaten Lombok Utara (Mira Janu Yustisi, 2018)	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	Hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, pertama dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan konflik diantara para stakeholder. Kedua, Kerjasama tidak dilakukan antar ketiga sektor (pemerintah, swasta dan masyarakat), Ketiga, dilihat dari aspek koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan hanya ditentukan oleh para ahli	Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan lapangan, meneliti adanya para stakeholde rs.	Perbedaan penelitian yaitu objek yang dikaji.

		saja (pemerintah). Keempat, kolaborasi yang dilakukan hanya melibatkan dua sektor yakni pemerintah dan swasta		
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	Proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Penglipuran melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder pariwisata diharapkan meningkatkan peranannya terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan selalu menjaga kebersihan, kerapian, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan serta dalam hal	Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan lapangan.	erbedaan penelitian yaitu objek yang dikaji. Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu Ketahanan Sosial Budaya,

<p>Penglipuran Bali) (Anak Agung Istri Andriyani dkk, 2017)</p>		<p>promosi oleh pengelola desa wisata baik melalui internet maupun brosur agar dicantumkan lebih detail tentang kegiatan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran (Andriyani, Martono, &amp; Muhammad, 2017)</p>		
<p>Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmoj</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p>Upaya pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Bejiharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pengembangan Desa Wisata Bejiharjo pemerintah desa masih mengalami beberapa hambatan-hambatan antara lain Belum dibuat susunan anggaran yang berdampak bagi pemerintah desa kebingungan dalam mengeluarkan dana untuk menyediakan sarana dan</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan lapangan, mengguna</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu kolaborasi pengelola desa wisata</p>



<p>o Kabupaten Gunungkidul) (Rizky Purna Aji Galih Pangestu dkk, 2016)</p>		<p>prasarana wisata, Banyaknya pengelola obyek wisata yang belum resmi ikut dalam pengelolaan Desa Wisata Bejiharjo yang mengakibatkan pendapatan pengelola resmi Desa Wsiata Bejiharjo tidak bisa maksimal dan lain sebagainya (Pangestu, 2016).</p>	<p>kan obyek yang sama.</p>	<p>antara tiga stakeholde rs.</p>
<p>Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencana Volcano</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p>Pengelolaan pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance dengan memberikan otoritas penuh pada Tim Pengelola untuk menjadi penggerak transformasi merupakan alternatif utama agar pengelolaan pariwisata-bencana dapat berlanjut. collaborative governance dalam kontek pariwisata-bencana mengalami transformasi dari hubungan yang</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan Collaborative Governance.</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu obyek wisata yang dikaji. Obyek wisata penelitian yang diteliti</p>

<p>Tour Merapi Di Kabupaten Sleman (Muchama d Zaenuri, 2016)</p>		<p>bersifat informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi, dan dari shared vision menuju kemitraan.</p>		<p>oleh peneliti yaitu Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman</p>
<p>Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p>Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Volcano Tour Merapi sebagai salah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Sleman sangat baik seperti penyediaan pelayanan wisata dan juga dalam usaha wisata. Model pengelolaan pariwisata-bencana berbasis collaborative governance dari</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu dari segi dinamika kolaborasi Kick Emerson &amp; Tina Nabatchi</p>

<p>Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman) (Muchamad Zaenuri, Tunjung Sulaksono, 2015)</p>		<p>segi shared vision lebih banyak menekankan pada hubungan yang bersifat komando antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat. Disamping itu, dari segi partisipasi diwarnai hubungan yang bersifat koordinasi, baik kepada swasta maupun masyarakat.</p>	<p>deskriptif dan lapangan, sama sama menggunakan Kolaboratif Governance.</p>	
<p>Collaborative Governance Regimes (Kirk Emerson, Tina Nabatchi, 2015)</p>	<p>Penelitian Collaborative Governance berstudi kasus di beberapa Negara</p>	<p>Buku ini membahas tentang studi kasus collaborative governance di beberapa Negara. Buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian bagian pertama, membahas tentang tinjauan umum mengenai collaborative governance; bagian kedua, kerangka integrative collaborative governance; bagian ketiga, studi kasus rezim</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu membahas Collaborative Governance</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu penelitian Collaborative Governance yang berstudi kasus di</p>

		<p>collaborative governance; dan bagian keempat rezim collaborative governance. Pada bagian kerangka integrative collaboration governance dijelaskan Dinamika Collaborative Governance yang berfokus pada 3 komponen yaitu, Pergerakan prinsip bersama, Motivasi bersama dan Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.</p>		berbagai negara
<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p>Atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Hampir seluruh masyarakat Desa Tulungrejo telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan telah siap dalam industri pariwisata.</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu hanya berfokus pada Dampaknya Terhadap</p>

<p>Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu (Nikita Amalia dkk, 2018)</p>		<p>Partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo lebih dari satu bentuk partisipasi. Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai buah apel. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi yaitu sosialisasi lebih lanjut dari POKDARWIS Desa Tulungrejo untuk mengajak masyarakat yang belum aktif, salah satunya dengan mengadakan acara adat desa yang melibatkan seluruh masyarakat kemudian acara tersebut dipromosikan lebih luas sehingga menjadi suatu atraksi</p>	<p>kualitatif deskriptif dan lapangan.</p>	<p>Perekonomian Warga.</p>
--	--	---	--	----------------------------

		wisata dan menarik minat wisatawan.		
Desa Mandiri, Desa Membangun (Kurniawan, 2015)	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	3 langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” Langkah pertama, mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kedua, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Ketiga, memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa	Persamaan penelitian yaitu berkonsep dasar pengertian dari Desa Mandiri	Perbedaan penelitian yaitu tidak menggunakan kolaborasi stakeholders

		<p>mandiri di lain pihak juga ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.</p> <p>(Kurniawan, 2015)</p>		
<p>Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour”.</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif</p>	<p>Salah satu tindakan penerapan tata kelola kolaboratif terlihat melalui pengelolaan Tur Lava di Merapi. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi situs pariwisata, menggenangi pemerintah. Karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan swasta, dan juga dengan warga negara. Makalah ini menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah,</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu membahas Collaborative Governance.</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu dari segi dinamika kolaborasi Kick Emerson &amp; Tina Nabatchi</p>

Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon (2017)		swasta, dan warga negara.  Berdasarkan analisis, bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah Kemitraan yang sesuai dengan klasifikasi Bryson (2014)		
“Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta (Sambodo	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa, Model Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, secara umum adalah sama dengan Model Collaborative Governance yang dibuat oleh Ansel dan Gash. Ada beberapa faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, yaitu: Hubungan Kekerabatan, Arisan, Jam Karet, Musyawarah	Persamaan penelitian yaitu membahas Collaborative Governance	Perbedaan penelitian yaitu dari segi dinamika kolaborasi Kick Emerson & Tina Nabatchi



dan Pribadi, 2017)		Mufakat, Nggih ra Kepanggih, Ngaruhke, Gotong Royong dan Swadaya, Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa, Paternalistik dan Orangnya Sekitar Itu itu Saja		
Pemasaran Desa Wisata Bejiharjo Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo (Natalia Kristianti, 2019)	Penelitian lapangan, kualitatif deskriptif	Strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo adalah sebagai berikut, yaitu: (1) produk unggulan Dewa Bejo adalah wisata alam yang berada di kawasan desa Bejiharjo; (2) promosi banyak dilakukan menggunakan website dan media sosial; (3) Dewa Bejo memiliki lokasi strategis; (4) Dewa Bejo menggunakan strategi diskon, kombinasi harga, dan kenaikan harga tiket untuk pengoptimalan pendapatan; (5) kapasitas personel ditingkatkan	Persamaan penelitian yaitu membahas Collaborative Governance.	Perbedaan penelitian yaitu dari segi dinamika kolaborasi Kick Emerson & Tina Nabatchi

		<p>melalui berbagai macam pelatihan umum dan khusus; (6) Dewa Bejo melakukan perbaikan fasilitas umum untuk kenyamanan wisatawan; dan (7) proses manajemen dilakukan dengan berfokus pada pengorganisasian melalui peran aktif pemimpin dan adanya riset pemasaran, penciptaan budaya organisasi melalui kerja sama secara kekeluargaan dan komunikasi antar bagian, dan pengendalian kinerja pemasaran melalui rapat rutin dan pengamatan.</p>		
<p>Kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembangunan</p>		<p>(1) kolaborasi antara pemangku kepentingan di Pulau Merah hampir tidak berjalan dengan lancar. Namun demikian ada beberapa komponen kolaborasi</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu membahas Collaborat</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu berdasarkan Desa</p>

<p>an Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwani Fairuza, 2017</p>		<p>yang dominan, yang berkontribusi pada keberhasilan pengembangan pariwisata di Pulau Merah. Komponen-komponen ini adalah saling pengertian, administrasi yang unggul, dan mutualitas yang menghasilkan kolaborasi ini dalam hal mencapai tujuan mereka walaupun beberapa konflik internal terjadi; (2) Pencapaian pembangunan inklusif di Pulau Merah sangat unggul karena manfaat pembangunan telah dirasakan secara merata dan didistribusikan kepada masyarakat lokal di sekitar Pulau Merah; sementara itu partisipasi masyarakat lokal cukup kuat, dan terakhir, pemahaman masyarakat lokal</p>	<p>ive Governan ce</p>	<p>Mandiri Budaya</p>
--	--	--	--------------------------------	---------------------------

		terkait dengan urgensi pelestarian lingkungan relatif tinggi		
--	--	---	--	--

## **E. Kajian Teori**

### **1. Pengelolaan**

#### **a. Pengertian Pengelolaan**

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Menurut (Hasibuan, 2011) aktifitas mengatur merupakan inti dari manajemen dilakukan melakukan melalui proses yang panjang berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari *managemen tyang* berasal dari kata *manage* atau *magiare* yang berarti melatih kuda dalam melangkahakan kakinya. Dalam pengertian manajemen, terkandung dua kegiatan ialah kegiatan berpikir (*mind*) dan kegiatan tingkah laku (*action*) (Prihatin, 2011).

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan manager untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan) (Usman, 2014).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan

proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Evaluasi dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

#### **b. Fungsi Pengelolaan**

Berdasarkan uraian pengertian manajemen di atas, secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahapan sekaligus fungsi dari manajemen yaitu terdiri atas: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, namun tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diterapkan dimana saja dan dalam format organisasi apa saja.

Sementara itu, fungsi manajemen dalam pembelajaran yaitu tidak jauh beda dengan manajemen pada umumnya. Secara umum, fungsi manajemen menurut George R. Terry dalam (Hasibuan, 2011) terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

### 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Dalam proses belajar mengajar geografi, perencanaan program pembelajaran memiliki peran penting. Perencanaan menentukan langkah pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Laiper dalam (Wulansari, 2014) *Planning* merupakan suatu proses pembuatan strategi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan memiliki kedudukan penting dalam manajemen desa wisata secara umum. Perencanaan yang baik akan memandu aktivitas lainnya agar berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan dari cita-cita mewujudkan desa wisata. Oleh karena itu perencanaan harus dibuat sebaik mungkin agar menemui kesuksesan yang memuaskan.

### 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu mekanisme atau suatu struktur, yang dengan struktur itu semua subyek, perangkat lunak dan perangkat keras yang semuanya dapat bekerja secara efektif,

dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan porposinya masing-masing.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam mewujudkan tujuan tersebut para manajer dituntut untuk mampu memilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota anggota organisasi.

Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan geografi akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan desa wisata maka akansangat membantu bagi para pengelola suatu program dalam melakukan pengelolaan desa wisata.

### 3) Penggerakan (*actuating*)



Penggerakan atau disebut juga pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam fungsi pengarahan terdapat empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi arahan, isi pengarahan, dan metode pengarahan. Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan. Yang diberi pengarahan adalah orang yang di inginkan dapat merealisasikan pengarahan. Isi pengarahan adalah sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan (Maimun & Fitri, 2010).

Isi pengarahan dalam manajemen pembelajaran ini yaitu dapat berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan di luar kemampuan si penerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh si penerima pengarahan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam pengelolaan desa wisata merupakan proses bimbingan agar personil yang terlibat mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-

sungguh dan bersemangat untuk mewujudkan tujuan-tujuan desa wisata.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat materiil maupun spirituil yang disusun dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-benar dicapai. Untuk mengetahui hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun diperlukan informasi melalui komunikasi dengan bawahan (Maimun & Fitri, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, dalam suatu manajemen organisasi perencanaan menjadi proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

## **2. Desa Mandiri Budaya**

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator tertentu, antara lain yaitu adanya perubahan struktur di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia khususnya di desa untuk melihat seberapa maju dan berkembangnya suatu desa dapat dilihat dari statusnya. Status desa ini dapat diketahui melalui kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun, klasifikasi status desa yang meliputi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal (lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Indeks Desa Membangun ).

Kemajuan dan kemandirian desa tidak lepas dari peranan Pemerintah desa setempat. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha

masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Akili & Moonti, 2022). Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas :

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala Desa
- 2) Unsur Pembantu kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas
  - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (Akili & Moonti, 2022).

Menurut Pergub No 36 Tahun 2014 Pasal 1, bahwa Desa Budaya adalah Desa/Kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan dan mengkonversi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner,

pengobatan tradisional, pemetaan uang dan warisan budaya. Sementara itu, yang dimaksud dengan desa mandiri yaitu status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Pada umumnya desa yang jauh dari pusat pemerintahan tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Desa Mandiri Budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal untuk mengaktualisasikan, mengembangkan dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya benda dan tak benda yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam yaitu (Kurniawan, 2015) :

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak *responsive* dalam masyarakat.

- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis dengan organisasi warganya. Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan *local leadership* kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif - progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan. Tapi tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis.
- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal system perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa). Sebagai contoh, Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul berhasil mendirikan dan mengembangkan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi wisatanya berupa air terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono.

Pemerintah Provinsi DIY mendorong pertumbuhan desa mandiri budaya di tahun 2019. Desa Mandiri Budaya ini diharapkan bisa menjadi eksportir pendulang dollar segala produk kerajinan di daerah tersebut (TribunJogja, 2018). Desa Mandiri Budaya merupakan penjelmaan dari berbagai predikat desa yang pernah ada seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo ketika menghandiri acara Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Sabdodadi, Bantul (Utomo, 2019). Pemerintah Provinsi DIY kemudian membagi Desa Mandiri Budaya diantaranya adalah

### 1. Desa Budaya

Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya (PERGUB DIY NOMOR 36 TAHUN 2014)

### 2. Desa Prima

Desa Prima adalah sebuah desa percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dengan melibatkan segenap peran lintas sektoral terkait (BPPMJogja, 2017).

### 3. Desa Preneur

Desa preneur merupakan desa wirausaha sehingga pelatihan dan bimbingan teknis harus terus-menerus dilakukan, walaupun tidak semua desa atau wilayah tidak beruntung mendapat program pelatihan dikarenakan anggaran pemerintah yang terbatas, harapan beliau agar semua peserta mengikuti dengan seksama, serius dan penuh semangat seperti yang dikemukakan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X (rch, 2017)



#### 4. Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu wisata buatan yang relatif masih mempertahankan keaslian dari adat istiadat maupun budaya masyarakat setempat. Inovasi dan kreasi yang ada di desa tersebut disesuaikan dengan potensi budaya yang sudah dipunyai sejak dahulu (Zaenuri & Sulaksono, Pengelolaan Pariwisata Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman, 2015)

#### **F. Definisi Konseptual**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Pemerintahan Desa merupakan suatu usaha-usaha organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Desa Mandiri Budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui partisipatif aktif warga internal maupun eksternal dalam mengembangkan kekayaan potensi budaya yang dimilikinya.

## **G. Definisi Operasional**

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional penelitian adalah:

1. Pengelolaan terdiri atas indikator sebagai berikut:

- a. Perencanaan
  - Tujuan
  - Visi misi
  - Program kerja
- b. Pengorganisasian
  - Struktur organisasi
  - Pembagian tugas organisasi
- c. Penggerakan
  - Pengarah
  - Yang diberi arahan
  - Isi pengarahan
  - Metode pengarahan
- d. Pengawasan
  - Monitoring
  - Evaluasi

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad seperti dikutip (Margaretha, 2013), menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan dan situasi penyelidikan. Adapun metode penelitian dalam proposal penelitian ini antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Bahaddur, 2012). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan desa wisata berbasis Desa Mandiri Budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten GunungKidul secara mendalam dan komprehensif.

## **2. Lokasi Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota dari Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo yang berada di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kepengurusan dari BUMDES maju mandiri yang beralamatkan di dusun Banyubening I RT.002/RW. 010, Desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, kab. Gunungkidul, serta keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Desa Bejiharjo yang beralamatkan di Banyubening II No. 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Wisata Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

## **3. Jenis Data**

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini membutuhkan berbagai sumber yang digunakan, antara lain:

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data Primer didapat dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui atau yang berhubungan mengenai penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa Bejiharjo
- 2) Direktur BUM Desa Maju Mandiri
- 3) Kepala pengurus Kelompok Sadar Wisata Dewabejo
- 4) Kepala Unit Simpan Pinjam (PT BRI Teras Bejiharjo)
- 5) Kepala Unit Persewaan (PT Lion Parcel)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian di lapangan, maka digunakan teknik antara lain

a. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data yang valid dan relevan mengenai penelitian ini, informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui yang berhubungan mengenai penelitian ini. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa Bejiharjo
- 2) Direktur BUM Desa Maju Mandiri
- 3) Kepala Pengurus Kelompok Sadar Wisata Dewabejo
- 4) Kepala Unit Simpan Pinjam (PT BRI Teras Desa Bejiharjo)

5) Kepala Unit Persewaan (PT Lion Parcel)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku-buku serta bahan-bahan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Unit Analisis**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, dalam (Bahaddur, 2012), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Kepala Desa Bejiharjo, Direktur BUM Desa Maju Mandiri, Kepala Pengurus Kelompok Sadar Wisata Dewabejo, Kepala Unit Simpan Pinjam (Teras BRI), dan Kepala Unit Persewaan (Lion Parcel)

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin seperti dikutip (Bahaddur, 2012), yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu

menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui studi dokumentasi yang didukung dengan observasi dan wawancara.